

Karakter Kepemimpinan dalam Ideologi Pancasila Dilihat dari Perspektif *Vita Activa-Vita Contemplativa* Hannah Arendt dan Simbion Mutualis J.M. Balkin

Mardohar Batu Bornok Simanjuntak

Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan

mardohar.batu@unpar.ac.id

Ester Oka Nugraheni

Mahasiswa D3 Manajemen Program Pendidikan dan Vokasi Universitas Katolik Parahyangan

5032305003@student.unpar.ac.id

Abstrak

Menjadi pemimpin mengandaikan keterlibatan aktif agensi yang bersangkutan dalam lokus kepemimpinannya. Proposisi ini mengandaikan bahwa seorang pemimpin memiliki relasi resiprokal terhadap dua pihak: konstituen dan non-konstituennya. Kondisi perpolitikan Indonesia saat ini cenderung non-resiprokal terhadap non-konstituen sehingga legitimasi pemimpin menjadi terbagi ke dalam kantong-kantong pemilihan yang cenderung homogen dalam setiap pemilihan umum. Hannah Arendt mengajukan gagasan *vita activa* dan *vita contemplativa*, yang sebenarnya merupakan sebuah metode siklik untuk terus memeriksa secara resiprokal sebuah tindakan baik dalam persepsi eksternal-internal (eksterosepsi) maupun persepsi internal-eksternal (interosepsi) dalam kerangka yang diajukan Anil Seth. Di dalam penelitian ini, penulis menggagas sebuah model kepemimpinan yang didasarkan pada evaluasi siklik semacam ini. Sebagai fondasi teoretisnya, penulis mengambil kategorisasi instrumen ideologi simbion mutualis yang digagas oleh J.M. Balkin. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada kepemimpinan yang evaluatif dalam tahapan interosepsi maupun eksterosepsi dapat memberikan peluang bagi terciptanya sebuah model yang inklusif terhadap konstituen.

Kata Kunci: *vita contemplativa, vita activa, elector, kepemimpinan evaluatif, interosepsi, eksterosepsi*

Pendahuluan

Persoalan epistemologi secara umum pasca Kantian adalah radikalisi dikotomi subjek dan objek yang kemudian buntu menjadi persoalan dampak. Meskipun Immanuel Kant menyaratkan legitimasi proses dalam pendekatan etis lewat gagasan deontologinya, kita dapat melihat garis pemikiran Kant sebagai titik kelahiran problematika sains modern – yang sebelumnya dipicu oleh René Descartes (Descartes, 2006).

Bagi Kant, legitimasi dampak etis harus dapat dijustifikasi oleh legitimasi proses – sebagaimana sains harus menjamin metodenya untuk tetap ilmiah dalam setiap tahapannya (Kant, 1993). Demikian pula dalam politik, kepercayaan Kant tentang sebuah dampak politik yang sah hanya dapat diperoleh dengan syarat distribusi kekuasaan yang mencegah polarisasi kekuatan (Kant, 2019).

Masalah dari fondasi Kantian adalah pada karakter linearnya, sebagaimana dampak sains modern yang mengakomodasi kemajuan namun gagal mencapai titik keseimbangan saat tingkat kompleksitas permasalahan mencapai titik saturasinya. Dengan kata lain, desain Kantian adalah sebuah desain simpleks yang tidak lagi tepat dengan solusi multidimensional-global yang menuntut sebuah metode kerja yang bersifat sirkular (Gosh, 2020).

Sirkularitas ini bahkan dimulai dari partikularitas agensi kognitif dalam tataran individual, seperti yang digagas oleh jalur eksterosepsi dan interosepsi dari Anil Seth. Seorang pengkaji neurosains, Seth mengatakan bahwa realitas mental manusia adalah sebuah proses resiprokal antara pengolahan data sensorik dari realitas eksternal (eksterosepsi) ke internal, dan sebaliknya, dari realitas internal di dalam otak manusia (intra-kranial) ke realitas

eksternal (interosepsi). Proses ini adalah sebuah proses siklik tanpa henti, sehingga realitas mental selalu dievaluasi oleh realitas eksternal manusia (Seth, 2020).

Kompleksitas permasalahan global saat ini tidak lagi bisa dimentahkan sebagai semata-mata persoalan bahasa, karena keterlibat sains dalam setiap tahapan tidak dapat dianggap sepele. Inter-disiplinaritas berbagai disiplin membuat persoalan filsafat pada hakikatnya adalah sebuah persoalan yang sifatnya riil dan mendesak. Seperti yang digagas J.B. Thompson, ideologi lebih tepat diletakkan sebagai sebuah kerangka kerja, dan bukan sebagai sebuah ilusi (Thompson, 1984). Membawa gagasan Thompson ke tataran praksis, J.M. Balkin menghadirkan tiga skemata karakter ideologi, yaitu virus, filter, dan simbion (Balkin, 1998).

Pancasila dalam sistem yang diajukan Balkin masuk ke dalam kategori simbion, yang berarti baik ideologi maupun agensi yang mempergunakan ideologi tersebut ada dalam relasi yang saling menguntungkan. Ini terbukti dengan kekuatan ideologi Pancasila dalam mengikat konstituen partai-partai yang berideologi nasionalis di Indonesia bahkan hingga setelah empat pemilihan umum di masa Reformasi (Suryadinata, 2018).

Pendekatan terhadap kompleksitas permasalahan sekarang lebih tepatnya diletakkan dalam kerangka sirkular, dan untuk itu penulis mencoba mengangkat kembali pendekatan siklik yang dihadirkan oleh Hannah Arendt. Sebagai seorang Yahudi di Jerman, Arendt terpaksa harus keluar dari negaranya karena ancaman dari Partai Nazi. Kondisi ini memaksa Arendt untuk merenungkan ulang arti dari modernitas dan kemajuan dalam kaitannya dengan hakikat kemanusiaan (Swift, 2009).

Singkatnya, metode linear yang digagas Descartes dan kemudian diradikalisasi oleh Kant menjadi persoalan yang sangat serius, yang berdampak pada tragedi *Holocaust*. Arendt mencoba melihat ulang bagaimana sains dan teknologi dapat begitu abai terhadap persoalan yang sangat mendasar seperti hak-hak azasi manusia. Totaliterianisme adalah sebuah ekseks yang menggugat fondasi pencerahan (*Aufklaerung*) sebagai motor dari kemajuan peradaban manusia (Baehr, 2010).

Pertanyaan yang menjadi materi tulisan dari artikel ini adalah apa fondasi dari pengintegrasian metode sirkular *vita activa* dan *vita contemplativa* Arendt ke dalam kepemimpinan dalam ideologi Pancasila yang bersifat simbion yang mampu mencegah fragmentasi konstituen dalam dinamika politik di Indonesia.

Metode Penelitian

Tulisan ini adalah sebuah kajian epistemologis ideologi karakter sirkular dari pendekatan Arendt terhadap realitas. Penulis mempergunakan kajian literatur untuk menunjukkan bahwa ritme siklik *vita activa* dan *vita contemplativa* akan menjadi alternatif untuk meminimalisasi ekseks dari linearitas perkembangan teknologi dan sains yang menegasi hakikat kemanusiaan.

Literatur utama yang menjadi sumber primer dari kajian ini adalah *The Human Condition*, yang ditulis Arendt pada tahun 1958. Sebagai bahan sekunder adalah tulisan Balkin yang berjudul *Cultural Software, A Theory of Ideology*. Selain gagasan Balkin, penulis juga akan mempergunakan gagasan Seth yang ditulisnya dalam *Being You*.

Untuk memeriksa ekseks eksklusivitas konstituenal, penulis mempergunakan tulisan Leo Suryadinata dalam *Pancasila and the Challenge of Political Islam: Past and Present*. Untuk melengkapi aspek empirisnya dari pembacaan terhadap tulisan Suryadinata, penulis mencoba mengajukan lima pertanyaan terhadap 18 orang responden seputar kesediaan mereka untuk menerima pemimpin yang berideologi Pancasila.

Hasil dan Pembahasan

Dalam refleksinya sebagai reaksi atas kekejaman yang terjadi di Perang Dunia Kedua, Arendt mencoba meninjau ulang hakikat dari kemajuan peradaban, khususnya dalam hal ilmu dan teknologi (Swift, 2009:2-3). Pembunuhan terorganisasi dan terstruktur yang dilakukan Nazi mengakibatkan korban jiwa 17 juta orang, enam juta di antaranya Yahudi (Statista, 2022). Bagi Arendt, peran masyarakat sipil sebagai eksekutor, seperti Adolf Eichmann membuat fondasi pemberadaban menjadi sangat problematis (Arendt, 2006; Swift, 2009:56-7). Arendt tidak bisa membayangkan sebuah situasi saat manusia tidak mampu menolak untuk menyiksa manusia lain hanya atas dasar perintah.

Pemeriksaan Arendt dimulai dengan menganalisis distorsi yang terjadi dalam kehidupan kaum urban. Manusia, bagi Arendt, bekerja sebagai persyarat yang sangat utama sebagai makhluk politik – *conditio per quam* – bahkan lebih dari *conditio sine qua non*. Keberadaan manusia dengan demikian adalah untuk selalu berada dalam hidup – *inter homines esse* – dan berakhir dalam kehidupan bersama manusia – *inter homines esse desinere*. Interaksi ini menghasilkan tiga tahapan bagi kemanusiaan yang utuh: *labor*, *work*, dan *action*. *Labor* adalah kerja tubuh, *work* adalah kerja strategis dalam kerangka sosial, dan *action* adalah bakti dalam kerangka politis (Arendt, 1998:7-9).

Dengan kata lain, manusia mulai dengan menginteraksikan tubuh dan dunia hidupnya, dan kemudian mengiriskannya dengan realitas hidup orang lain, dan terakhir masuk ke dalam sebuah sistem politis untuk melengkapi hakikatnya dalam *inter homines esse*. Inilah keutuhan *vita activa* yang menjadi bagian dari kemanusiaan jauh sebelum masuk ke dalam tatanan masyarakat urban.

Sebagai ilustrasi, seorang pedagang kopi bekerja dengan karung-karung kopi di tokonya, ikut aktif dalam menggiling kopi. Kemudian ia bekerja dengan pedagang dan perantara lain. Ia meminta karung dan tali rami, kemudian meminta tukang untuk membuat gudang, dan kemudian meminta distributor untuk mengirimkan kopinya. Ia pun menjadi anggota dari serikat pedagang kopi yang mencoba untuk mengatur permintaan dan penawaran serta pendistribusian kopi ke pelanggan, termasuk berbicara dengan pihak pemerintah tentang pajak penjualan.

Dalam ilustrasi di atas, tahapan *labor* adalah saat sang pedagang mempergunakan tubuhnya untuk berinteraksi langsung dengan biji-biji kopi yang dijualnya. Di tahapan *work*, sang pedagang berinteraksi secara strategis dengan mata rantai yang ada di dalam bisnis kopi. Terakhir, dengan memilih menjadi menjadi pedagang kopi, ia sampai pada tahap *action* saat semua tindakannya dimaknai sebagai tindakan politis yang mendefinisikan dirinya.

Istilah *labor* dalam pemaknaan Arendt dapat kita serap dengan istilah kerja, sedangkan *work* sebagai karya, dan *action* sebagai bakti. *Vita activa* adalah kesinambungan ketiga elemen tersebut: kerja, usaha, dan bakti. Manusia baru utuh bila ia berkerja, berkarya, dan berbakti. Perhatikan bahwa bagi Arendt, tahapan bakti sangat penting: tanpa bakti manusia tidak dapat dikategorikan sebagai hidup (*bios*) – sehingga kemanusiaan *vita activa* adalah *bios politikos*. Bersama dengan *bios theoutikos* – atau *vita contemplativa*, keduanya membentuk *areté* – kemanusiaan dalam kesejatan ultimnya (Arendt, 1998:12-5).

Dalam kerja, manusia mengalami penubuhan dengan realitas yang bekerja dengannya – *to somati ergazesthai*. Hakikat kemanusiaan sebagai homo faber ini kemudian dilanjutkan ke tahapan sosial, dan terakhir ke wilayah politis (Arendt, 2001:25-32). Hasil dari *vita activa* adalah *thaumazein* – sebuah kekaguman atas keutuhan dari keseluruhan proses. Hanya dengan kelengkapan ini manusia siap untuk masuk menghidupi *vita contemplativa* (Arendt, 2001:40). Ini berarti relasi komplementer yang juga bersifat resiprokal antara *bios politikos* dan *bios theoutikos* adalah definisi dari kemanusiaan itu sendiri. Absennya salah satu elemen adalah sumber dari brutalitas “warga negara yang patuh” seperti Adolf Eichmann atau penelantaran dan anihilasi seperti yang dialami oleh enam juta warga Yahudi di kamp konsentrasi.

Karakter ini menjadi penting dalam kerangka ideologi. Menurut Balkin, ketiga ideologi sion, parasitik, komensal, dan mutualis memiliki karakter yang tidak merusak (Balkin, 1998:61-8). Namun di antara ketiga jenis tersebut, karakter yang paling menguntungkan adalah yang bersifat mutualis. Titik irisan antara kepemimpinan ideologis Balkin dengan pendekatan sirkular dan resiprokal Arendt dapat ditemukan di kategori sion mutualis ini. Kepemimpinan sion mutualis menyoroti *vita activa* dan *vita contemplativa*; ketiadaan keduanya, atau absennya salah satu elemen, akan membuatnya menjadi sion komensal atau parasitik. Berikut kategorisasi yang penulis tawarkan dalam tabel berikut ini.

Irisan antara Karakter *Vita Activa* dan *Vita Contemplativa* Kepemimpinan dengan Relasi Sion

Tawaran Relasi Ideologi Sion	Elemen Kepemimpinan <i>Vita Activa</i>	Elemen Kepemimpinan <i>Vita Contemplativa</i>
Sion Mutualis	Dipenuhi	Dipenuhi
Sion Komensal	Dipenuhi Sebagian	Tidak dipenuhi
Sion Pseudo-Komensal	Tidak dipenuhi	Dipenuhi
Sion Parasitik	Tidak dipenuhi	Tidak dipenuhi

Di dalam tabel tersebut, keberadaan kedua karakter komplementer yang diajukan oleh Arendt membuat kategori relasi sionnya menjadi mutualis. Bila hanya satu ragam karakter saja yang dipenuhi, maka bentuk relasinya bersifat komensal. Bila relasi sion tersebut tidak menghadirkan keduanya, maka bentuk relasinya menjadi parasitik. Bentuk irisan tersebut dapat kita lihat dalam ilustrasi berikut ini.

Pemimpin A berasal dari daerah pemilihan dengan konstituen X dan non-konstituen Y. Dalam praktiknya, kepemimpinan A tidak melibatkan elemen *vita activa* karena ketiadaan tiga elemen berikut ini. Pertama, A tidak terlibat langsung dengan non-konstituennya dalam menyelesaikan masalah non-konstituen Y – semua persoalan diselesaikan oleh aparat pemerintahan setempat. Menjelang pemilihan umum, A terlibat dengan konstituen X demi kepentingan perolehan suara.

Kedua, A tidak terlibat secara sosial dengan non-konstituen Y, dan keterlibatan dengan konstituen X-nya berlangsung menjelang pemilihan umum – karena alasan kedekatan etnis atau religi tertentu. Ketiga, A tidak memperjuangkan aspirasi non-konstituen Y; untuk konstituen X, aspirasi yang diperhatikan yang memiliki dampak signifikan dalam perolehan suara untuk kepentingan pemilu. Dengan tidak dipenuhinya ketiga elemen pokok dari *vita activa* (kerja, karya, dan bakti), A tidak mungkin mengajak konstituennya untuk masuk ke dalam keterlibatan *vita contemplativa*. Konsekuensinya, kepemimpinan A bersifat parasitik.

Pemimpin B berasal dari daerah pemilihan dengan konstituennya P dan non-konstituennya R. Dalam praktiknya, B terlibat secara langsung dengan konstituen P dan non-konstituen R, dan keterlibatannya tidak bergantung pada jadwal pemilihan umum. Demikian pula dengan keterlibatan karya, B ikut berperan dalam interaksi sosial dengan kedua konstituen. Namun dalam hal bakti, B hanya menanggapi aspirasi konstituen P menjelang pemilihan umum dan mengabaikan non-konstituen R. Berdasarkan prinsip yang digariskan Arendt, maka pemimpin B memimpin secara komensal.

Pemimpin C berasal dari daerah pemilihan dengan konstituen S dan non-konstituen T. Baik dalam sisi kerja, karya, dan bakti, C hanya melakukan untuk konstituen S dan mengabaikan non-konstituen T, dan semuanya dilakukan menjelang pemilihan umum. Namun C aktif terlibat dengan karakter *vita contemplativa* baik dengan konstituen dan non-konstituennya, dan keterlibatannya tidak bergantung pada waktu pelaksanaan pemilihan umum. C memiliki tipe kepemimpinan pseudo-komensal – atau bersifat semu.

Pemimpin D berasal sebaliknya mengerjakan setiap tahapan dalam *vita activa* baik untuk konstituen dan non-konstituennya, dan kerja, karya, serta baktinya tidak bergantung pada waktu kampanye pemilihan umum. Menurut Arendt, hanya saat tiga tahapan tersebut sudah dipenuhi, maka *vita contemplativa* – misalnya dalam bentuk perenungan religio-filosofis akan memiliki legitimasi. Kepemimpinan simbio D bersifat mutualis.

Dengan kata lain, penerapan Pancasila sebagai sebuah ideologi sangat bergantung pada seberapa utuh elemen *vita activa* yang dipenuhi. Ideologi sebagai sebuah skema gagasan dapat mengambil wujud sebagai *vita contemplativa* yang tidak memiliki fondasi (bandingkan dengan Simanjuntak, 2022).

Dalam persepektif neurosains, konstruksi mental harus terus diiriskan dengan realitas fisik yang ada berinteraksi langsung dengan agensi yang mengonstruksi. Tahapan pertama dari proses konstruksi mental berlangsung dari luar ke dalam, yang bersifat eksteroseptif. Hasil pencerapan ini kemudian diterapkan secara tubuh dengan segala keterbatasannya dan menghasilkan interaksi interoseptif: imaji mental yang dihasilkan diproyeksikan ke luar dengan mempergunakan tolak ukur tubuh sang agensi (Seth, 2012; Seth, 2020).

Dalam kosa-kata Seth, tahapan kerja dalam *vita activa* Arendt adalah sebuah fondasi yang bersifat personal dan unik. Perlu diingat bahwa bagi Arendt setiap tahapan adalah prasyarat bagi fase selanjutnya, dan dengan demikian, *vita activa* dalam irisan pemahaman Seth adalah sebuah keterlibatan yang sangat personal – dan dengan demikian *vita contemplativa* yang dihasilkan pun menjadi sangat personal. Ketiadaan *vita activa* fase kerja hanya akan memastikan bahwa kepemimpinan pseudo-komensal dan parasitis akan menjadi sangat impersonal.

Arendt mengatakan bahwa segregasi apapun dalam politik yang totaliter berasal dari pola pikir ras (*race thinking*), dan akar dari pola pikir ras ini adalah para aristokrat (Arendt, 1976:161). Garis argumen Arendt ini dapat penulis teruskan sebagai berikut: aristokrasi – atau varian ideologisnya aristokratisme – berasal dari keterpisahan antara *vita contemplativa* dengan *vita activa* kerja. Dengan demikian, akar dari segregasi yang menjadi fondasi dari totalitarianisme ada pada impersonalitas yang berasal dari ketidakterlibatan agensi dengan realitasnya.

Kepemimpinan dalam ideologi Pancasila baru dapat menjadi sesuatu yang bersifat simbio mutualis hanya jika kedua aspek komplementer yang diajukan Arendt dipenuhi. Ini berarti Pancasila sebagai ideologi dalam memimpin berisiko menjadi simbio komensal, pseudo-komensal, dan bahkan parasitis. Dengan demikian, tidak ada jaminan gamitan ideologi Pancasila yang dilakukan seorang pemimpin akan membuatnya masuk dalam kategori simbio mutualis. Dalam perspektif Arendt dan Balkin, totalitarianism bahkan bisa dilakukan lewat Pancasila.

Suryadinata mengatakan bahwa kebangkrutan ideologi Pancasila di era totalitarian Suharto membuat ideologi berbasis agama naik sebagai ideologi alternatif bagi Indonesia. Hingga tahun 2018, namun demikian, ideologi tersebut tidak berhasil menggaet fondasi elektoral yang kokoh (Suryadinata, 2018). Dengan kata lain, menurut pemaparan dalam artikel ini, penulis mengajukan hipotesis bahwa ketidakberhasilan ideologi alternatif untuk meraih mayoritas dalam empat kali pemilihan umum tingkat nasional di Indonesia (1999, 2004, 2009, 2014) sangat mungkin karena karakter non-inklusifnya yang membuatnya gagal meraih suara dari non-konstituen.

Untuk menggali aspirasi publik terhadap ideologi Pancasila dalam kepemimpinan, penulis mengajukan pertanyaan yang sifatnya kualitatif terhadap 18 orang responden yang dipilih secara acak – dan semuanya berasal dari kelompok usia dewasa muda. Dari jawaban yang penulis terima, 77, 78% berpendapat bahwa Pancasila adalah aspek yang penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin. Tentang Pancasila sebagai ideologi yang berlaku baik bagi pemimpin dan konstituen, 77,22% setuju dengan pendapat tersebut, namun 22,22%

berpendapat bahwa warga negara boleh memiliki ideologi yang berbeda, sementara ada 5,56% responden yang mengatakan bahwa Pancasila harus direvisi lagi sebelum menjadi ideologi pemimpin negara.

Dari jajak pendapat spontan dengan sampel acak, ternyata Pancasila masih belum menjadi sebuah ideologi yang sifatnya final, namun sebagai ideologi untuk kepemimpinan Pancasila masih menjadi jawaban yang cukup kuat. Dengan kata lain, dalam pemikiran Arendt, ideologi Pancasila bagi para pemimpin adalah sebuah proses kerja yang tanpa garis akhir. Menggamit ideologi Pancasila berarti masuk ke dalam proses sirkular dan resiprokal dan bersifat inklusif. Hasil dari proses ini adalah sebuah disposisi ideologi yang simbiosis mutualis.

Kesimpulan

Mempergunakan Pancasila sebagai ideologi dalam pemimpin harus melibatkan ketiga elemen dasar dalam *vita activa*: kerja, karya, dan bakti. Fragmentasi atau segregasi konstituen terjadi karena ketiadaan fase kerja – yang merupakan prasyarat dalam mekanisme komplementer *vita activa* – *vita contemplativa* yang diajukan Arendt. Absennya elemen fundamental tersebut membuat kepemimpinan menjadi sangat impersonal, dan sebagai konsekuensinya, menurut pemikiran Balkin, ideologi Pancasila tidak akan mungkin berperan sebagai simbiosis mutualis. Ketidakhadiran elemen dasar tersebut akan membuatnya menjadi simbiosis komensal atau pseudo-komensal. Fragmentasi konstituen hanya mungkin dilakukan saat model kepemimpinan yang diraih berideologi Pancasila dalam kategori simbiosis mutualis.

Daftar Pustaka

- Arendt, Hannah. (1976). *The Origin of Totalitarianism*. San Diego: Harvest Book.
- Arendt, Hannah. (1998). *The Human Condition*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Arendt, Hannah. (2001). “The Human Condition” dalam *Philosophy and the Problems of Work*. Editor Schaff, Kory. Rowman & Littlefield Publishers Inc.
- Arendt, Hannah. (2006). *Eichmann in Jerusalem, A Report on the Banality of Evil*. Penguin Books.
- Balkin, J.M., (1998). *Cultural Software, A Theory of Ideology*. New Haven: Yale University Press.
- Baehr, Peter. (2010). *Hannah Arendt, Totalitarianism, and the Social Sciences*. Stanford: Stanford University Press.
- Descartes, Rene. (2006). *A Discourse on the Method of Correctly Conducting One's Reason and Seeking Truth in the Sciences*. Penerjemah, Ian Maclean. Oxford: Oxford University Press.
- Gosh, Sadhan Kumar. (2020). *Circular Economy, Global Perspective*. Springer.
- Kant, Immanuel. (1939). *Perpetual Peace*. New York: Columbia University Press.
- Kant, Immanuel. (1993). *Critique of Practical Reason*. Penerjemah, Lewis White Beck. New York: Macmillan Publishing Company.
- Seth, A. (2017). *Being You: A New Science of Consciousness*. Imprint: Faber & Faber.
- Seth, A., Suzuki, K., & Critchley, H. D. (2012). “An interoceptive predictive coding model of conscious presence”. In *Frontiers in Psychology*, 2, 395.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2011.00395>

- Simanjuntak, Mardohar Batu Bornok. (2022). Alternatif Menghadirkan Nilai Pancasila sebagai Potensi Titik Tumpu Karya Fotografis dalam Perspektif Teori Ideologi Jack M. Balkin. Dalam *Jurnal Pembeduan Pancasila*, Vol. 2 (2).
- Suryadinata, Leo. (2018). *Pancasila and the Challenge of Political Islam: Past and Present*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Statista. (2022). <https://www.statista.com/statistics/1071011/holocaust-nazi-persecution-victims-wwii/>
- Swift, Simon.(2009). *Hannah Arendt*. London and New York: Routledge.
- Thompson, J.B. (1984). *Studies in the Theory of Ideology*. Berkeley: University of California Press.